



Article Informations
Corresponding Email:
rizqezragamaliel@gmail.com

Received: 25/08/2025; Accepted:
10/01/2026; Published: 26/02/2026

KEPENTINGAN NASIONAL AMERIKA SERIKAT DALAM KEBIJAKAN CYBER SECURITY TERHADAP APLIKASI TIKTOK

Ezra Gamaliel Rizq

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kepentingan nasional Amerika Serikat dalam kebijakan keamanan siber (*cyber security*) terhadap TikTok, sebuah aplikasi berbagi video pendek milik perusahaan Tiongkok, ByteDance. Penelitian ini berkaitan dengan konteks rivalitas teknologi dan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Fokus penelitian diarahkan pada analisis kebijakan *cyber security* Amerika Serikat terhadap di TikTok pada tahun 2020-2025. Selain itu difokuskan juga pada analisis bagaimana aspek pertahanan, ekonomi, tatanan dunia, dan ideologi menjadi faktor utama yang melatarbelakangi kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek *defence interest*, AS menilai TikTok berpotensi membahayakan keamanan data warganya melalui regulasi Tiongkok seperti *National Intelligence Law* (2017). Pada aspek *economic interest*, TikTok menjadi pedang bermata dua, pada satu sisi TikTok menaikkan bisnis UMKM AS, di sisi lain TikTok melemahkan industri teknologi AS. Pada aspek *world order interest*, kebijakan ini mencerminkan upaya AS mempertahankan hegemoninya di era teknologi global. Sementara pada aspek *ideological interest*, perbedaan ideologi liberal-demokratis AS dan otoritarianisme Tiongkok turut memicu kekhawatiran terhadap sensor dan disinformasi.

Kata Kunci: Kepentingan Nasional, Amerika Serikat, Keamanan Siber, TikTok, Tiongkok

Abstract

This study aims to analyze how the United States' national interests in cybersecurity policy towards TikTok, a short video sharing application owned by the Chinese company, ByteDance. This research relates to the context of technological and geopolitical rivalry between the United States and China. The research focuses on analyzing the United States' cybersecurity policy towards TikTok in 2020-2025. In addition, it also focuses on analyzing how aspects of defense, economics, world order, and ideology are the main factors behind this policy. The results of the study show that in terms of defense interest, the US considers TikTok to have the potential to endanger the security of its citizens' data through Chinese regulations such as the National Intelligence Law (2017). In terms of economic interest, TikTok is a double-edged sword: on the one hand, TikTok increases the business of US MSMEs, on the other hand, TikTok weakens the US technology industry. In terms of world order

interest, this policy reflects the US's efforts to maintain its hegemony in the global technology era. Meanwhile, in terms of ideological interest, the differences between the US's liberal-democratic ideology and China's authoritarianism have also fueled concerns about censorship and disinformation.

Keywords: *National Interest, United States, Cyber Security, TikTok, China*

1. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi digital, teknologi tidak hanya berperan sebagai alat produksi atau komunikasi, tetapi telah menjadi elemen kunci dalam menentukan kekuatan dan pengaruh suatu negara di panggung internasional. Kemampuan suatu negara dalam mengembangkan dan menguasai teknologi strategis seperti *artificial intelligence* (AI), semikonduktor, dan infrastruktur digital lainnya kini dianggap sebagai indikator utama kekuatan nasional. Menurut laporan dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), kemajuan teknologi yang pesat dan adopsi inovasi digital telah menggeser konsep *balance of power*. Negara-negara yang mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi baru akan memperoleh keunggulan strategis dibandingkan yang tertinggal dalam transformasi digital (Zirojević 2024).

Dalam konteks rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok, isu teknologi tidak dapat dipisahkan dari dinamika persaingan hegemonik. Kebijakan tarif dan pembatasan ekspor teknologi bukan hanya bertujuan untuk melindungi industri domestik, tetapi juga untuk menghambat kemajuan teknologi pihak lawan dan mempertahankan dominasi global. Memahami peran sentral teknologi dalam menentukan kekuatan nasional dan pengaruh global sangat penting untuk menganalisis dinamika perang dagang modern. Hal ini menunjukkan bahwa konflik ekonomi saat ini tidak hanya didorong oleh pertimbangan perdagangan, tetapi juga oleh upaya strategis untuk menguasai teknologi yang menjadi fondasi kekuatan di era digital. Salah satu contoh nyata dari dinamika ini adalah munculnya TikTok sebagai kekuatan teknologi digital global yang menimbulkan kekhawatiran strategis di Amerika Serikat.

Menurut data dari Buffer, pada tahun 2025, TikTok memiliki sekitar 136 juta pengguna aktif bulanan di Amerika Serikat, yang mencakup lebih

dari 30% dari populasi negara tersebut (Tamilore Oladipo 2025). Pertumbuhan ini menjadikan TikTok sebagai salah satu platform media sosial terbesar di Amerika Serikat, bersaing dengan platform-platform mapan seperti Instagram dan YouTube (Enberg 2025). Keberhasilan TikTok di pasar Amerika Serikat tidak hanya terlihat dari jumlah penggunaannya, tetapi juga dari dampak budayanya. Platform ini telah menjadi sarana utama bagi banyak individu untuk mengekspresikan diri, berbagi informasi, dan bahkan mempengaruhi tren budaya populer. Banyak konten viral, tantangan, dan meme yang berasal dari TikTok kemudian menyebar ke platform lain dan media arus utama (Boffone 2022). Namun, perkembangan TikTok di pasar Amerika Serikat juga memicu kekhawatiran di kalangan pembuat kebijakan dan regulator. Asal-usulnya dari Tiongkok menimbulkan pertanyaan tentang keamanan data dan potensi pengaruh asing. Hal ini menyebabkan pemerintah Amerika Serikat mempertimbangkan berbagai tindakan untuk menjaga *cyber security*, termasuk kemungkinan pelarangan atau pemisahan kepemilikan TikTok dari ByteDance. Dengan demikian, pertumbuhan pesat TikTok di AS mencerminkan dinamika kompleks antara inovasi teknologi, budaya populer, dan geopolitik.

Kekhawatiran utama berkisar pada kemungkinan akses pemerintah Tiongkok terhadap data pengguna TikTok, mengingat ByteDance merupakan perusahaan induk TikTok yang berbasis di Tiongkok sehingga data para pengguna TikTok di Amerika Serikat berpotensi digunakan untuk tujuan spionase atau propaganda (Eugene Kiely 2025). Dengan demikian, TikTok tidak lagi sekadar aplikasi hiburan, melainkan telah menjadi alat strategis yang dapat mempengaruhi keamanan nasional, politik domestik, dan posisi geopolitik suatu negara. Hal ini mencerminkan bagaimana platform digital dapat digunakan sebagai instrumen kekuatan lunak (*soft power*) dalam persaingan antarnegara di era digital. Kekhawatiran dari Amerika Serikat sendiri mencerminkan proses "sekuritisasi digital," di mana isu teknologi dan data pribadi diposisikan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional (James Andrew Lewis 2022).

Amerika Serikat telah mengambil serangkaian kebijakan *cyber security* untuk menanggapi kekhawatiran terhadap ancaman keamanan data yang

ditimbulkan oleh TikTok. Pemerintah Amerika Serikat mencurigai bahwa data pengguna TikTok dapat diakses oleh pemerintah Tiongkok, yang berpotensi membahayakan privasi warga Amerika Serikat dan digunakan untuk kepentingan spionase. Kebijakan *cyber security* Amerika Serikat terhadap TikTok diawali pada masa pemerintahan Donald Trump, dengan mengeluarkan *executive order* yang melarang setiap perusahaan atau individu Amerika Serikat melakukan kerja sama bisnis dengan TikTok (Bobby Allyn 2020). Serangkaian kebijakan *cyber security* tersebut terus dilanjutkan pada masa pemerintahan Joe Biden dan kembali lagi pada masa pemerintahan Donald Trump selama tiga periode masa pemerintahan berturut-turut. Hingga pada awal tahun 2025 Amerika Serikat mendesak TikTok untuk melakukan divestasi kepada Amerika Serikat, dengan konsekuensi TikTok akan diblokir dari Amerika Serikat (Bobby Allyn 2020).

Amerika Serikat seringkali menyampaikan bahwa langkah kebijakan *cyber security* yang diambil berakar pada kekhawatirannya pada isu keamanan data pengguna TikTok, di mana data warga negara Amerika Serikat dikhawatirkan dapat diakses oleh pemerintah Tiongkok melalui ByteDance, induk perusahaan TikTok. Namun jika dilihat lebih jauh, narasi keamanan data tersebut tampaknya hanya merupakan permukaan salah satu alasan dari kepentingan nasional lainnya dari Amerika Serikat. Dalam konteks rivalitas persaingan teknologi digital yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Sangat mungkin bahwa kebijakan *cyber security* terhadap TikTok juga merupakan bagian dari strategi geopolitik dan ekonomi Amerika Serikat untuk membatasi ekspansi pengaruh digital Tiongkok di panggung global dan melindungi kepentingan nasional Amerika Serikat.

Pendekatan yang digunakan adalah Realisme Ofensif yang dikembangkan oleh John J. Mearsheimer. Teori ini menekankan jika struktur sistem internasional yang anarkis menciptakan kondisi di mana negara-negara terdorong untuk memaksimalkan kekuatan militer mereka dengan tujuan utama: meraih hegemoni demi menjamin keamanan dan kelangsungan hidupnya. realisme ofensif menyatakan bahwa negara tidak

bisa pernah benar-benar aman kecuali mereka menjadi kekuatan paling dominan di sistem internasional (Mearsheimer 2001).

Selain itu digunakan juga konsep kepentingan nasional dari Donald E. Nuechterlein. Menurut Donald E. Nuechterlein, national interest dalam bentuk paling sederhana merujuk pada kebutuhan dan keinginan yang dianggap penting oleh suatu negara dalam interaksi dengan negara-negara lainnya, yang membentuk lingkungan eksternal. Nuechterlein memecah kepentingan nasional tersebut menjadi empat syarat dasar utama dalam membantu mengidentifikasi kepentingan nasional dari suatu negara, yaitu *Defence interest*, *Economic interest*, *World Order interest*, dan *ideological interest* (Nuechterlein 1976).

2. PEMBAHASAN

Pembahasan dalam bab ini difokuskan pada penerapan kerangka analisis kepentingan nasional menurut Donald E. Nuechterlein yang membagi kepentingan suatu negara ke dalam empat indikator utama: *defence interest* (kepentingan pertahanan), *economic interest* (kepentingan ekonomi), *world order interest* (kepentingan tatanan dunia), dan *ideological interest* (kepentingan ideologi). Melalui keempat indikator ini, analisis akan menelaah alasan strategis mengapa Amerika Serikat merasa perlu mengatur, membatasi, bahkan pada titik tertentu berupaya melarang TikTok di wilayahnya melalui kebijakan *cyber security* yang dibentuknya.

2.1 Analisis Defence Interest (Kepentingan Pertahanan)

Dalam perspektif kepentingan pertahanan, data yang dikumpulkan oleh platform digital seperti TikTok tidak dapat dipandang sekadar sebagai informasi yang tidak penting. Data yang dikoleksi oleh TikTok cukup krusial bagi suatu negara, berdasarkan kebijakannya koleksi data TikTok mencakup data lokasi pengguna (*IP address*), pola pengetikan (*keystroke patterns*), dan tipe perangkat yang digunakan penggunanya. Aplikasi ini juga mengoleksi data dari riwayat penelusuran pengguna, termasuk seluruh pertukaran pesan atau messaging yang dilakukan pada aplikasi ini. Selain itu, dengan izin pengguna TikTok aplikasi ini juga dapat mengakses beberapa informasi tambahan antaran lain adalah nomor telepon, daftar kontak, jejaring sosial,

data GPS, usia pengguna, konten yang dihasilkan pengguna (misalnya foto dan video), data pembayaran yang tersimpan, serta rekam jejak interaksi dengan video, baik yang disukai, dibagikan, ditonton penuh, maupun ditonton ulang (Figliola 2023).

Meski begitu TikTok beranggapan bahwa data yang mereka koleksi adalah data yang umum dikoleksi oleh platform media sosial, dan data yang mereka koleksi tidak lebih banyak dibandingkan dengan platform lainnya seperti Facebook dan Google (Figliola 2023). Akan tetapi AS memandang bahwa ketika data pengguna tersebut dikoleksi dalam jumlah besar dan terkonsentrasi pada satu perusahaan asing, terlebih lagi perusahaan yang berbasis di Tiongkok dengan regulasi keamanan nasional yang ketat, maka terdapat potensi penggunaan data tersebut digunakan untuk tujuan politik maupun militer yang berlawanan dengan kepentingan Amerika Serikat.

TikTok, sebagai platform media sosial yang dimiliki oleh ByteDance Ltd. dan berbasis di Beijing, sering dipandang oleh Amerika Serikat sebagai entitas yang rentan terhadap intervensi pemerintah Tiongkok. Kekhawatiran ini didasari oleh adanya kerangka regulasi domestik Tiongkok yang secara eksplisit mengatur keterlibatan sektor swasta dalam mendukung kepentingan negara. Salah satu regulasi yang paling relevan dan jadi sorotan adalah National Intelligence Law (2017). Regulasi ini merupakan bagian dari strategi keamanan nasional Tiongkok yang membentuk kerangka hukum untuk memperkuat kontrol negara atas keamanan informasi, komunikasi, dan aktivitas intelijen. National Intelligence Law (2017) ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas intelijen negara dalam menghadapi ancaman domestik maupun internasional, serta memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat Tiongkok dapat berkontribusi pada perlindungan keamanan nasional.

Poin utama yang menjadi sorotan dan kekhawatiran AS dalam National Intelligence Law (2017) terdapat pada pasal 7 yang berbunyi “*Any organization or citizen shall support, assist and cooperate with the state intelligence work in accordance with the law, and keep the secrets of the national intelligence work known to the public.*” (National People’s Congress of the People’s Republic of China 2017). Artinya dengan adanya pasal tersebut,

semua pihak baik individu maupun perusahaan swasta tidak memiliki ruang untuk menolak apabila diminta oleh otoritas negara untuk memberikan informasi atau akses terhadap data. Dengan demikian, perusahaan teknologi besar seperti ByteDance (pemilik TikTok) secara hukum berkewajiban membantu aparat intelijen Tiongkok ketika diminta.

Selain itu ada beberapa pasal lainnya yang mendukung pernyataan pada pasal 7 dalam National Intelligence Law (2017) antara lain adalah pasal 10 “state intelligence work agencies shall use the necessary methods, means and channels to carry out intelligence work at home and abroad according to their work needs.” dan juga pasal 14 “state intelligence work organization shall carry out intelligence work according to law, and may require relevant organs, organizations and citizens to provide necessary support, assistance and cooperation.”(National People’s Congress of the People’s Republic of China 2017). Pasal-pasal tersebut memperlihatkan bahwa tidak ada pemisahan jelas antara sektor swasta dan kepentingan negara di Tiongkok. Dengan adanya kewajiban mutlak bagi perusahaan untuk membantu intelijen, maka kehadiran ByteDance di AS dipersepsikan sebagai risiko keamanan nasional yang nyata, terutama dalam konteks persaingan geopolitik AS-Tiongkok.

Struktur kepemilikan ByteDance sebagai induk perusahaan TikTok turut memperkuat kekhawatiran Amerika Serikat dalam isu keamanan data. Hal ini disebabkan oleh adanya kepemilikan “golden share” oleh pemerintah Tiongkok sebesar 1% di perusahaan tersebut. Golden share merupakan bentuk kepemilikan saham dengan hak istimewa yang memungkinkan pemerintah Tiongkok untuk memiliki pengaruh strategis dalam proses pengambilan keputusan perusahaan, meskipun secara nominal jumlah saham yang dimiliki relatif kecil (POLITICALVERSE 2025). Akuisisi golden share ini dilakukan oleh pemerintah Tiongkok melalui China Internet Investment Fund (CIIF) pada tahun 2021 terhadap perusahaan induk TikTok yaitu ByteDance sebesar 1% (Congressional Research Service 2024). Dengan hak ini, pemerintah dapat menunjuk direktur atau memiliki hak veto terhadap keputusan bisnis tertentu, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan data dan algoritma. Dalam praktiknya, golden share

berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan orientasi korporasi sejalan dengan kebijakan nasional, sementara tetap membiarkan operasi bisnis berjalan secara relatif independen dari intervensi publik langsung.

2.2 Analisis *Economic Interest* (Kepentingan Ekonomi)

Sejak kemunculannya di pasar Amerika Serikat pada 2018 melalui akuisisi Musical.ly oleh ByteDance, TikTok berkembang pesat dan bertransformasi menjadi salah satu platform media sosial paling berpengaruh di Amerika Serikat. Dalam waktu singkat, aplikasi asal Tiongkok ini berhasil menantang dominasi perusahaan teknologi raksasa asal AS seperti Meta (Facebook dan Instagram), Google (YouTube), dan Snapchat, yang sebelumnya mendominasi ruang media sosial Amerika Serikat. Keberhasilan TikTok dalam menembus pasar Amerika Serikat, tidak dapat dilepaskan dari strategi awal yang mengintegrasikan inovasi teknologis dengan pendekatan budaya populer. Setelah akuisisi dan penggabungan dengan aplikasi Musical.ly pada tahun 2018, TikTok berhasil menyerap berbagai fitur yang sebelumnya telah populer di kalangan remaja, seperti personalisasi feed berbasis algoritma, filter kreatif, serta kemampuan menciptakan dan menyebarkan video viral secara cepat. Hal ini memperkuat daya tarik TikTok sebagai platform hiburan interaktif yang mudah diadaptasi oleh generasi muda.

Dampak dari strategi tersebut terlihat dalam pertumbuhan pesat jumlah pengguna TikTok di AS. Hanya dalam beberapa bulan setelah merger dengan Musical.ly tahun 2018, TikTok berhasil hampir menggandakan basis pengguna yang awalnya sekitar 200 juta pengguna aktif (Peter Hasselworth 2025). Tidak hanya itu, TikTok juga muncul sebagai salah satu aplikasi paling banyak diunduh di Amerika Serikat pada periode yang sama, melampaui aplikasi media sosial mapan seperti Facebook dan Instagram.

Transformasi TikTok di Amerika Serikat telah membentuk ekosistem ekonomi baru di dalam platform, di mana remaja Amerika memanfaatkannya sebagai sarana transaksi jual beli. TikTok juga telah menjadi media utama bagi masyarakat AS dalam mencari produk yang diminati. Secara keseluruhan, sekitar 74% pengguna TikTok di AS menggunakan aplikasi ini

untuk melakukan pencarian produk (Caroline Shalabi 2024). Hal tersebut membuat para pelaku bisnis UMKM di AS memanfaatkan platform TikTok untuk mengembangkan bisnisnya. Banyak dari pelaku UMKM di AS melakukan promosi produknya melalui iklan berbayar di TikTok. Hingga akhirnya melalui kegiatan iklan berbayar TikTok mengalami kenaikan pendapatan yang signifikan dari setiap tahunnya.

Pendapatan iklan TikTok di Amerika Serikat melonjak tajam dari US\$ 2,10 miliar pada tahun 2021 menjadi US\$ 5,96 miliar pada tahun 2022. Pertumbuhan ini berlanjut pada tahun 2023, mencapai US\$ 8,75 miliar, dan diproyeksikan menembus US\$ 11,01 miliar pada tahun 2024. Peningkatan pendapatan yang signifikan ini menegaskan posisi TikTok sebagai pemain kunci dalam ekonomi digital AS dan menunjukkan perannya yang strategis dalam membentuk strategi pemasaran dan perilaku konsumen (Daniel Ruby 2025).

Dalam perspektif bisnis, TikTok memang terbukti memberikan manfaat signifikan bagi pertumbuhan UMKM di Amerika Serikat. Platform ini memungkinkan usaha kecil dan menengah untuk menjangkau audiens yang luas melalui konten kreatif, algoritma rekomendasi yang efektif, dan fitur-fitur seperti TikTok Shop yang mempermudah transaksi. Banyak UMKM melaporkan peningkatan penjualan, brand awareness, dan interaksi konsumen yang lebih tinggi berkat eksposur organik maupun berbayar di platform ini. Akan tetapi, manfaat ekonomi tersebut bersifat jangka pendek dalam konteks kepentingan nasional Amerika Serikat. Meskipun TikTok mendorong aktivitas ekonomi dan konsumsi digital, pemerintah AS tetap menghadapi risiko signifikan terkait keamanan data warganya. Kepemilikan TikTok oleh perusahaan Tiongkok, ByteDance, serta potensi akses pemerintah Tiongkok terhadap data pengguna, menimbulkan kekhawatiran strategis.

Sebagai konsekuensi, meskipun TikTok memberikan dorongan ekonomi bagi UMKM, pemerintah AS memiliki insentif untuk mengakuisisi atau mengintegrasikan TikTok ke dalam platform digital yang dikendalikan domestik. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan kontrol atas data sensitif, mengamankan algoritma rekomendasi, dan mengurangi potensi

risiko terhadap keamanan nasional, sambil tetap memanfaatkan potensi ekonomi yang ditawarkan oleh aplikasi tersebut.

2.3 Analisis *World Order Interest* (Kepentingan Tatahan Dunia)

Amerika Serikat telah lama memosisikan dirinya sebagai kekuatan dominan dalam industri platform teknologi digital global. Sejak awal 2000-an, perusahaan-perusahaan AS berhasil memanfaatkan keunggulan teknologi, modal ventura yang melimpah, serta infrastruktur internet yang maju untuk membangun ekosistem digital yang luas dan berpengaruh secara global. Dominasi ini diwujudkan melalui perusahaan unggulan seperti Google, yang menjadi pemimpin dalam layanan pencarian dan periklanan digital, serta Meta (dahulu Facebook), yang mendominasi jejaring sosial dan komunikasi daring.

Di sisi lain, kompetitor non-AS pada saat itu relatif sedikit dan belum memiliki kapasitas teknologi, pendanaan, atau ekosistem global yang setara. Misalnya, platform sosial di Eropa dan Asia masih berskala regional dan terbatas pada bahasa atau budaya tertentu seperti Hi5 di Eropa atau Mixi di Jepang yang membuat adopsi globalnya lambat (Erick Schonfeld 2008). Demikian pula, perusahaan pencarian lokal seperti Baidu di Tiongkok baru mulai menonjol setelah pertengahan 2000-an, tetapi penetrasi globalnya dibatasi oleh regulasi domestik dan hambatan bahasa.

Google dalam industri mesin pencari global merupakan salah satu manifestasi nyata dari hegemoni digital yang dikuasai oleh Amerika Serikat. Berdasarkan data terbaru di tahun 2025, Google menguasai lebih dari 92% pasar mesin pencari (search engine) global, dengan rincian 72% pada perangkat desktop dan 92% pada perangkat mobile (Torbjorn Flensted 2025). Selain dominasi Google dalam industri mesin pencari, perusahaan asal Amerika Serikat lainnya, yakni Meta juga menunjukkan supremasi yang kuat dalam industri media sosial global. Meta, yang menaungi platform Facebook dan Instagram merupakan salah satu kompetitor utama dari aplikasi TikTok. Berdasarkan data terbaru di tahun 2025, jumlah pengguna aktif bulanan Facebook mencapai sekitar 3,065 miliar (Backlinko Team 2025a). Sedangkan Instagram memiliki sekitar 2 miliar pengguna aktif bulanan (Backlinko Team

2025b). Angka ini menunjukkan capaian yang masih jauh lebih unggul dibandingkan TikTok yang mencatatkan sekitar 1,12 miliar pengguna aktif bulanan (Backlinko Team 2025c).

Meskipun jumlah pengguna aktif bulanan TikTok masih berada di bawah Facebook dan Instagram, fenomena yang terjadi menunjukkan adanya dinamika baru dalam industri media sosial global. TikTok merupakan satu-satunya platform yang berasal dari luar Amerika Serikat dan berhasil menembus pasar global dengan peningkatan yang sangat cepat. Popularitas TikTok tidak hanya ditentukan oleh jumlah pengguna, tetapi juga oleh dampak kultural serta model distribusi kontennya yang berbasis algoritma rekomendasi. Keberhasilan TikTok menembus pasar global menjadi pesaing serius bagi raksasa teknologi asal Amerika Serikat yang menandai adanya perubahan dalam struktur hegemoni digital global.

Sebagai negara yang mendominasi industri platform digital global, Amerika Serikat memiliki peran sentral dalam membentuk arah kebijakan digital dunia. Platform digital yang berbasis di Amerika Serikat, seperti Facebook, Instagram, dan YouTube, bukan hanya berfungsi sebagai raksasa teknologi, melainkan juga sebagai “pembuat standar” dalam tata kelola ruang digital. Kebijakan yang mereka kembangkan, khususnya terkait moderasi konten, sering kali menjadi rujukan bagi platform lain di seluruh dunia. Seperti pada saat Amerika mengembangkan kebijakan untuk memoderasi konten untuk platform digitalnya, seperti aturan tentang ujaran kebencian, disinformasi, atau konten kekerasan. Maka negara lain atau platform yang lebih kecil mengembangkan kebijakannya, mereka sering kali melihat model yang telah dibuat oleh Facebook atau Instagram sebagai acuan utama. Hal ini membentuk *norma de facto* dalam ekosistem internet global tentang apa yang dianggap "diizinkan" di internet.

Secara implisit TikTok melanggar *norma de facto* dari hal apa yang dibenarkan pada industri platform digital saat ini. Antara lain yaitu tentang kepemilikan dan pengendalian TikTok sendiri tunduk pada hukum Tiongkok, termasuk National Intelligence Law 2017 yang dapat memaksa perusahaan untuk menyerahkan data kepada pemerintah yang bertentangan dengan norma kepemilikan swasta yang "terpisah" dari negara. Selain itu ada pada

ketidaktransparanan algoritma TikTok, meskipun semua platform memiliki algoritma, kekhawatiran AS mengacu pada negara Tiongkok yang otoriter, bahwa algoritma TikTok dapat dimanipulasi untuk mempromosikan atau menyembunyikan isu-isu yang menyoroti Tiongkok. Serta pada aspek pengumpulan data yang beresiko jatuh ke tangan pemerintah Tiongkok.

Sehingga pada saat Amerika Serikat melakukan investigasi terhadap TikTok atas kecurigaannya pada keamanan data pengguna yang dapat membahayakan keamanan negara, secara tidak langsung hal ini menjadi sorotan juga bagi negara lainnya. Meskipun tidak ada mandat langsung dari AS, kebijakan *cyber security* AS menjadi referensi bagi negara lain dalam menangani isu TikTok. Keputusan AS menciptakan preseden internasional yang memperkuat argumen keamanan teknologi dari Tiongkok. Banyak negara besar yang telah mengikuti jejak AS dalam melakukan pembatasan atas alasan keamanan data warganya, seperti India yang memberlakukan pemblokiran total sejak tahun 2020, Uni Eropa yang melarang TikTok pada perangkat pemerintah federal sejak tahun 2023, Britania Raya yang sama melarang TikTok pada perangkat pemerintah sejak tahun 2023, serta masih banyak negara-negara lainnya yang melakukan kebijakan *cyber security* terhadap TikTok (Kelvin Chan 2024). Langkah kebijakan *cyber security* AS terhadap TikTok memberikan justifikasi tambahan bagi negara-negara lainnya untuk menerapkan langkah serupa seperti Amerika Serikat untuk menciptakan keamanan dan stabilitas global.

2.4 Analisis Ideological Interest (Kepentingan Ideologis)

Amerika Serikat dikenal sebagai negara yang mendasarkan diri pada ideologi liberalisme, sebuah pandangan filosofis, politik, dan ekonomi yang berakar dari Eropa pada abad ke-17 dan ke-18 yang dipengaruhi oleh pemikir liberal seperti John Locke dan Montesquieu. Ideologi liberalisme pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang dibangun di atas prinsip-prinsip filsafat yang menempatkan kebebasan individu dan kedaulatan rakyat sebagai pilar utama (Locke n.d.). Ideologi liberal Amerika Serikat merupakan fondasi utama yang membentuk identitas politik, ekonomi, dan sosial negara tersebut. Dengan menekankan kebebasan individu, demokrasi, pasar bebas,

dan supremasi hukum. Liberalisme menjadi penggerak utama bagi pembangunan Amerika Serikat serta pengaruh globalnya. Di ranah internasional, ideologi liberal ini mendasari berbagai langkah dari strategi kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Berbeda kontras dengan negara rivalnya Tiongkok, Tiongkok menganut ideologi sosialisme dengan karakteristik Tiongkok (Socialism with Chinese Characteristics), sebuah bentuk adaptasi dari ideologi Marxisme-Leninisme yang disesuaikan dengan kondisi historis, budaya, dan sosial-ekonomi Tiongkok (BILL RIGHTS INSTITUTE n.d.). Inti dari ideologi ini dapat dirumuskan dalam beberapa prinsip antara lain adalah Kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok dalam hal ini pemerintah Tiongkok menjadi pusat otoritas politik. Selain itu sistem ekonomi sosialis kapitalis, meskipun berbasis sosialisme, Tiongkok mengadopsi mekanisme pasar dalam pembangunan ekonomi di mana sektor swasta berkembang pesat tetapi negara tetap memegang kendali strategis atas sektor kunci seperti energi, infrastruktur, telekomunikasi, dan pertahanan (Chen Ran 2017).

Perbedaan ideologi yang kontras inilah yang menjadi dasar dari kepentingan ideologi Amerika Serikat dalam melakukan kebijakan *cyber security* terhadap TikTok. Amerika Serikat, yang berlandaskan pada nilai-nilai liberalisme seperti demokrasi, kebebasan individu, keterbukaan pasar, serta supremasi hukum, memandang teknologi digital dan arus informasi global sebagai instrumen penting yang harus menjunjung kebebasan berekspresi. Dalam perspektif ini, media sosial tidak sekadar menjadi ruang komunikasi, melainkan juga arena untuk menanamkan nilai-nilai kebebasan berekspresi dan transparansi. Oleh karena itu, keberadaan TikTok sebagai platform yang berakar dari Tiongkok dianggap berpotensi menantang dominasi ideologi liberal Amerika Serikat, khususnya karena Tiongkok berpegang pada ideologi sosialis dengan karakteristik otoritarianisme, kontrol negara yang kuat, serta pembatasan terhadap kebebasan informasi.

Ketakutan Amerika Serikat terhadap TikTok tidak semata-mata berakar pada aspek jumlah pengguna atau pertumbuhan ekonomi digital yang dicapai platform tersebut, tetapi juga pada potensi bahaya ideologis dan politis yang terkandung dalam algoritma TikTok. Algoritma merupakan inti

dari keberhasilan aplikasi ini, karena ia berfungsi untuk menentukan konten apa yang ditampilkan kepada pengguna, membentuk preferensi mereka, serta memengaruhi pola konsumsi informasi di ruang digital. Dalam konteks keamanan nasional dan kepentingan ideologis, algoritma TikTok dipandang sebagai instrumen yang berpotensi dimanipulasi oleh pemerintah Tiongkok, mengingat ByteDance sebagai induk perusahaan berada di bawah yurisdiksi hukum Tiongkok yang mewajibkan kepatuhan perusahaan terhadap kepentingan negara, termasuk ke dalam National Intelligence Law (2017).

Bagi Amerika Serikat, ancaman terbesar dari algoritma TikTok terletak pada dua aspek utama. Pertama, ancaman terhadap kontrol informasi dan penyebaran ideologi. Amerika Serikat khawatir bahwa algoritma TikTok dapat dimanfaatkan untuk memperkuat narasi tertentu yang sejalan dengan kepentingan politik Tiongkok. Kedua, ancaman terhadap demokrasi dan proses politik Amerika Serikat. Dengan basis pengguna remaja AS yang besar, TikTok berpotensi menjadi ruang strategis untuk memengaruhi opini publik generasi muda AS. Algoritma yang dikontrol atau diarahkan oleh kepentingan eksternal berpotensi memengaruhi preferensi politik, perilaku pemilih, bahkan stabilitas sosial.

Algoritma TikTok ini juga diduga menyensor isu-isu sensitif yang menyudutkan Tiongkok. Dilansir dari The Guardian di tahun 2019 bukti penyensoran isu sensitif terhadap Tiongkok di TikTok ini terungkap pada penyensoran konten dalam peristiwa protes Hong Kong, di duga penyensoran ini didasari oleh kepentingan politik Tiongkok (Alex Hern 2019). Ditemukan juga bahwa TikTok akan melakukan tindakan ban pada setiap pengguna yang membagikan konten kritik terhadap sistem pemerintahan negara termasuk sistem sosialis Tiongkok. Konten yang membahas tentang kelompok Falun Gong di Tiongkok juga akan ditandai sebagai konten pelanggaran, karena mempromosikan bunuh diri (Alex Hern 2019).

Seluruh bukti dari penyensoran isu-isu sensitif yang menyudutkan Tiongkok ini juga tercantum dalam *Executive Order* 13942 yang diterbitkan oleh Donald Trump. Pada EO tersebut terdapat paragraf yang menyebutkan "*TikTok also reportedly censors content that the Chinese Communist Party deems politically sensitive, such as content concerning protests in Hong Kong*

and China's treatment of Uyghurs and other Muslim minorities. This mobile application may also be used for disinformation campaigns that benefit the Chinese Communist Party, such as when TikTok videos spread debunked conspiracy theories about the origins of the 2019 Novel Coronavirus." (The President 2020). Lebih jauh lagi, EO tersebut juga menegaskan bahwa TikTok berpotensi digunakan sebagai sarana kampanye disinformasi yang menguntungkan Tiongkok. Melalui argumen ini, pemerintah Amerika Serikat berupaya menunjukkan bahwa ancaman TikTok bukan hanya sebatas risiko keamanan data, melainkan juga menyangkut manipulasi informasi, kontrol narasi politik, dan keamanan ideologis yang algoritmanya berpotensi diatur oleh pemerintahan otoriter seperti Tiongkok.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan menggunakan kerangka kepentingan nasional Donald Nuechterlein, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan cyber security Amerika Serikat terhadap aplikasi TikTok bukanlah respons pada satu aspek tertentu saja, melainkan sebuah tindakan komprehensif yang didorong dan saling berkaitan dengan empat indikator kepentingan nasional: pertahanan, ekonomi, tatanan dunia, dan ideologis.

Pertama, dari aspek kepentingan pertahanan (*defence interest*), kebijakan ini merupakan respons langsung terhadap ancaman keamanan nasional yang dipersepsikan. Pemerintah AS berpandangan bahwa National Intelligence Law (2017) Tiongkok dapat memaksa ByteDance untuk menyerahkan data sensitif pengguna AS, yang berpotensi dimanfaatkan untuk spionase dan operasi intelijen. Kekhawatiran ini diperkuat oleh larangan TikTok pada perangkat pemerintah federal dan militer AS.

Kedua, dari aspek kepentingan ekonomi (*economic interest*), kebijakan siber AS adalah manifestasi dari upaya untuk mempertahankan hegemoni digitalnya. TikTok bagai pedang bermata dua meski memiliki dampak positif pada bisnis UMKM AS, di sisi lain TikTok juga menjadi kompetitor asing yang melemahkan industri teknologi AS. Dengan menerapkan kebijakan yang memaksa divestasi, AS berupaya untuk mengembalikan kendali atas pasar

digital domestik, mengamankan pasar, dan menjaga keunggulan kompetitif bagi perusahaan teknologinya.

Ketiga, dari aspek kepentingan tatanan dunia (*world order interest*), tindakan AS terhadap TikTok adalah bagian dari strategi geopolitik yang lebih luas. AS sebagai kekuatan dominan dari platform digital global berusaha untuk memproyeksikan visinya tentang tatanan digital yang aman yaitu terbuka dan bebas. Dengan melakukan tindakan kebijakan cyber security, AS sebagai kekuatan dominan platform digital global saat ini dapat memberikan justifikasi atau mempengaruhi negara lain terutama sekutu untuk mempertimbangkan kebijakan serupa dengan AS tentang aspek keamanan pada platform TikTok.

Keempat, dari aspek kepentingan ideologis (*ideological interest*), kebijakan ini mencerminkan konflik fundamental antara demokrasi liberal AS dan sistem otoriter Tiongkok. Kekhawatiran utama adalah bahwa algoritma TikTok dapat digunakan sebagai alat sensor dan manipulasi narasi, yang berpotensi mendoktrin pengguna TikTok di AS. Kebijakan siber ini menjadi tindakan protektif untuk mempertahankan nilai-nilai demokrasi dari pengaruh ideologis asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex Hern. 2019. "Revealed: How TikTok Censors Videos That Do Not Please Beijing." *The Guardian*. Retrieved August 21, 2025 (<https://www.theguardian.com/technology/2019/sep/25/revealed-how-tiktok-censors-videos-that-do-not-please-beijing>).
- Backlinko Team. 2025a. "Facebook User & Growth Statistics to Know in 2025." *BACKLINKO*. Retrieved August 20, 2025 (<https://backlinko.com/facebook-users>).
- Backlinko Team. 2025b. "Instagram Statistics 2025: Key Demographic and User Numbers." *BACKLINKO*. Retrieved August 20, 2025 (<https://backlinko.com/instagram-users>).
- Backlinko Team. 2025c. "TikTok Statistics You Need to Know in 2025." *BACKLINKO*. Retrieved August 20, 2025 (<https://backlinko.com/tiktok-users>).
- BILL RIGHTS INSTITUTE. n.d. "Principles and Virtues | Bill of Rights Institute." *BILL RIGHTS INSTITUTE*. Retrieved August 21, 2025 (<https://billofrightsinstitute.org/principles-and-virtues>).
- Bobby Allyn. 2020. "Trump Signs Executive Order That Will Effectively Ban Use Of TikTok In the U.S." *NPR*. Retrieved August 7, 2025 (<https://www.npr.org/2020/08/06/900019185/trump-signs-executive->

- order-that-will-effectively-ban-use-of-tiktok-in-the-u-s).
- Boffone, Trevor. 2022. *TikTok Cultures in the United States*. 1st ed. London: Routledge.
- Caroline Shalabi. 2024. "Guide to Social Media Marketing: Trends, Tactics, and Platforms." *EMARKETER*. Retrieved August 20, 2025 (<https://www.emarketer.com/learningcenter/guides/social-media-paid-ads/>).
- Chen Ran. 2017. "Four Deng Xiaoping Ideas That Changed China - CGTN." *CGTN*. Retrieved August 21, 2025 (https://news.cgtn.com/news/3d4d544f7a556a4d/share_p.html?).
- Congressional Research Service. 2024. *TikTok: Frequently Asked Questions and Issues*.
- Daniel Ruby. 2025. "TikTok Ad Revenue (2018–2027): Detailed Analysis." *Demandsage*. Retrieved August 22, 2025 (<https://www.demandsage.com/tiktok-ad-revenue/>).
- Enberg, Jasmine. 2025. "2025 Trend: The 'TikTokification' of Social Media Will Outlast the Potential TikTok Ban." *EMARKETER*. Retrieved May 29, 2025 (<https://www.emarketer.com/content/2025-trend--tiktokification-social-media-outlast-potential-tiktok-ban>).
- Erick Schonfeld. 2008. "The Global Race Among Social Networks Heats Up. Keep an Eye on Hi5, Friendster, and Imeem." *TechCrunch*. Retrieved August 20, 2025 (<https://techcrunch.com/2008/02/27/the-global-race-among-social-networks-heats-up-keep-an-eye-on-hi5-friendster-and-imeem/>).
- Eugene Kiely. 2025. "TikTok and U.S. National Security." *FactCheck.Org*. Retrieved June 10, 2025 (<https://www.factcheck.org/2025/02/tiktok-and-u-s-national-security/>).
- Figliola, Patricia Moloney. 2023. "TikTok: Technology Overview and Issues." *Congressional Research Service* 1–18.
- James Andrew Lewis. 2022. "Technology and the Shifting Balance of Power." *CENTER FOR STRATEGIC & INTERNATIONAL STUDIES*. Retrieved May 29, 2025 (<https://www.csis.org/analysis/technology-and-shifting-balance-power>).
- Kelvin Chan. 2024. "These Are the Countries Where TikTok Is Already Banned." *APNews*. Retrieved August 20, 2025 (<https://apnews.com/article/tiktok-bytedance-ban-china-india-376f32d78861e14e65ec4bc78e808a0d?>).
- Locke, John. n.d. "Second Treaties of Government." P. 80 in *Two Treaties of Government*.
- Mearsheimer, John J. 2001. *The Tragedy of Great Power Politics*. New York.
- National People's Congress of the People's Republic of China. 2017. *National Intelligence Law of the People's Republic*.
- Nuechterlein, Donald E. 1976. "National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making." *Review of International Studies* 2(3):246–66.
- Peter Hasselworth. 2025. "TikTok's Unprecedented Rise To Popularity." *IDigic*. Retrieved August 20, 2025 (<https://www.idigic.net/blog/tiktoks-unprecedented-rise-to-popularity?>).

- POLITICALVERSE. 2025. "A Deep Dive into TikTok's Ownership and Its Complex Stakeholding Structure." *POLITICALVERSE*. Retrieved August 19, 2025 (<https://www.politicalverse.info/2025/01/a-deep-dive-into-tiktoks-ownership-and.html?>).
- Tamilore Oladipo. 2025. "31 TikTok Statistics to Know for 2025." *Buffer*. Retrieved August 13, 2025 (<https://buffer.com/resources/tiktok-statistics>).
- The President. 2020. *Executive Order 13942: Addressing the Threat Posed by TikTok, and Taking Additional Steps to Address the National Emergency with Respect to the Information and Communications Technology and Services Supply Chain*. Vol. 1.
- Torbjorn Flensted. 2025. "How Many People Use Google? Statistics & Facts (2025)." Retrieved August 20, 2025 (<https://seo.ai/blog/how-many-people-use-google>).
- Zirojević, Ivana Z. 2024. "Digital Transformation of Geopolitics : New Tools , Actors , and Power Dynamics." *Kultura Polisa* 21:77–94.